

BAB V

KESIMPULAN

Bangsa Moro terletak di selatan Negara Filipina tepatnya berada di Mindanao Negara Filipina. Secara geografis wilayah Filipina terbagi menjadi dua wilayah kepulauan besar, yaitu utara dengan kepulauan Luzon dan gugusannya serta selatan dengan kepulauan Mindanao dan gugusannya. Klaim historis umat Islam atas Mindanao dan Sulu sebagai tanah air mereka sebelum penjajahan Spanyol di Filipina yang di mulai dengan kedatangan Jendral Leguspi pada tahun 1565. Pada tanggal 21 September 1972, Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan darurat militer terhadap pemberontakan yang berkembang MNLF melancarkan serangan balasan bersenjata dan menuntut pengakuan atas Negara merdeka untuk BangsaMoro (tanah air moro). Selama empat dekade pemerintahan Filipina melakukan beragam upaya terkait dengan konflik sparatisme yang terjadi dengan komunitas umat muslim di Minadanao.

Pada oktober 2012, pemerintahan Filipina dan perwakilan gerakan separatis MILF menyepakati sebuah perjanjian damai untuk mengakhiri konflik selama empat dekade tersebut. Pasalnya, dalam perjanjian tersebut pemerintah Filipina berupaya untuk memberikan hak-hak kepada masyarakat muslim Mindanao yang diwakili oleh MILF. Kesepakatan tersebut berupa otonomi khusus sehingga MILF dan masyarakat muslim Mindanao secara luas dianggap sebagai etnis politik baru yang mampu membuat hukum, menjalankan politik luar negeri, dan termasuk hak untuk memberlakukan sistem pajak secara terpisah dalam pemerintahan Filipina. Referendum UU BangsaMoro adalah elemen penting paska perdamaian dengan pemberontakan MILF. Lebih dari 2,83 juta pemilih terdaftar sebagai peserta referendum yang dilaksanakan di lima provinsi dan dua kota wilayah Mindanao. UU daerah otonomi BangsaMoro dirancang untuk menggantikan UU daerah otonom muslim Mindanao (ARMM) yang di berlakukan selama 29 tahun. UU yang baru akan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintahan otonomi Mindanao, misalnya atas hak-hak

pengangguran, pendapatan, sumber daya alam, administrasi pradilan, dan pelayanan sipil.

Proses negosiasi perdamaian yang disepakati dalam kerangka kerja dengan melibatkan komunitas internasional secara bertahap dapat menggantikan lingkaran sejarah perampasan, ketahanan, dan ketidakpercayaan di Mindanao menjadi dinamika yang positif. Proses negosiasi yang disepakati pada tanggal 11 September 2001 menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi di Moro, Filipina Selatan. Partisipasi negara lain dalam upaya penyelesaian konflik Moro mempunyai kontribusi yang signifikan. Beberapa negara yang ikut terkait dan menonjol dalam penyelesaian konflik Moro, seperti Amerika Serikat (AS), Libya, PBB dan *World Bank*, Jepang, Malaysia, Indonesia serta OKI. Namun dalam sub bab ini hanya dijelaskan pada beberapa negara yang lebih dominan dan hampir bersamaan dengan negara lainnya dalam memediasi konflik. Sehingga kali ini dalam upaya penyelesaian konflik agar lebih mudah dipahami terbagi menjadi dua, yakni melalui negara dan organisasi internasional.